

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kompleksitas regulasi UE telah menjadi salah satu faktor utama yang memperkecil peluang Indonesia dalam menyelesaikan masalah pembatasan ekspor CPO ke UE. Belum selesai dengan gugatan Indonesia di WTO atas tindakan UE yang mengkategorikan CPO sebagai bahan biofuel yang *High Risk Indirect Land Use Change (ILUC)*, tantangan baru kembali muncul dari UE. Pada 11 September 2019 industri sawit harus menghadapi kebijakan *European Green Deal (EGD)* yang lebih kompleks dan komprehensif dari RED II karena tidak hanya berkaitan dengan *biofuel* saja, tetapi juga mencakup seluruh produk turunan kelapa sawit. Regulasi ini berpotensi untuk semakin mempersulit masuknya produk kelapa sawit Indonesia ke negara-negara UE karena aturan ini lebih mengikat bagi anggota Negara UE. Jika sebelumnya pada kebijakan RED II-ILUC, UE hanya akan membatasi secara bertahap minyak sawit hanya untuk *biofuel*, tetapi kebijakan baru ini menyasar minyak sawit dan semua produk olahannya baik untuk pangan, oleokimia maupun *biofuel*.

Jika dipandang dari sisi internal, hambatan tersebut terjadi karena Indonesia masih lambat dalam mendorong sertifikasi ISPO nya. Selain itu, UE cenderung lebih menyukai sertifikasi yang lebih tinggi dan ketat seperti RSPO, namun sulit bagi Indonesia untuk mendorong perkebunan kelapa sawit Indonesia agar masuk kedalam RSPO karena tingginya biaya yang diperlukan sehingga akan

memangkas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan CPO Indonesia. Kendala ini akhirnya yang membuat CPO semakin sulit untuk masuk ke UE dan berpotensi akan terus dijejat oleh isu lingkungan, berbagai hambatan perdagangan CPO ke Indonesia ini menunjukkan jika pasar UE sudah tidak potensial lagi bagi keberlanjutan ekspor komoditas CPO Indonesia. Maka setelah proses gugatan di WTO yang diajukan Indonesia tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka serangkaian langkah alternatif diperlukan untuk menyelamatkan keberlangsungan industri CPO Indonesia.

Demikian dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis lebih lanjut mengenai langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berkepentingan, yaitu negara sebagai aktor utama dan organisasi kelapa sawit sebagai aktor non-negara dengan menggunakan konsep Diplomasi Multijalur. Pemerintah Indonesia yang masuk kedalam diplomasi jalur pertama yaitu *Government* berhasil menjalankan berbagai kerjasama diantaranya menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit atau yang disebut CPOPC untuk sama-sama melawan diskriminasi minyak kelapa sawit oleh UE. Kemudian menerbitkan beberapa kebijakan untuk menanggapi kebijakan proteksionisme yang dilakukan UE, mulai dari kebijakan pembatasan ekspor biji nikel yang sangat dibutuhkan oleh UE hingga mengeluarkan kebijakan ekspansi pasar alternatif negara yang berpotensi untuk tujuan ekspor baru CPO Indonesia selain UE.

Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut dapat dikatakan cukup berhasil karena respon dari UE yang cukup positif yaitu menunda pelarangan total ekspor CPO ke UE hingga tahun 2030, walaupun

dengan serangkaian aturan dan sertifikasi yang ketat. Bukan hanya itu, dengan menerbitkan kebijakan sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia atau ISPO dan menerapkan system pengolahan yang ramah lingkungan, Indonesia berhasil mengalihkan pasar ekspornya ke negara lain seperti India, Cina, Pakistan dan Amerika. Tentunya keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan kebijakan ISPO dan CPO tidak terlepas dari peran perusahaan dan organisasi kelapa sawit sebagai aktor non-negara. Diantaranya GAPKI dan APKASINDO yang berusaha melakukan diplomasi dua arah antara masyarakat Indonesia dan Parlemen UE dengan melakukan agenda *Joint Working Group* bersama negara-negara di Asia Tenggara dan UE untuk membahas keberlanjutan minyak nabati terutama pada sektor CPO yang menghasilkan dukungan diterimanya CPO Indonesia hingga batas tahun yang ditetapkan UE yaitu tahun 2030.

Bukan hanya para pengusaha yang tergabung dalam organisasi seperti GAPKI, para petani kelapa sawit yang juga terdampak ekonominya akibat kebijakan RED II UE juga kesejahteraannya yang kurang diperhatikan Pemerintah turut ikut andil berperan dalam meningkatkan peluang keberhasilan diplomasi CPO Indonesia dengan memfasilitasi mereka pelatihan dan teknologi pertanian yang dapat mempercepat perluasan penerapan standar ISPO keseluruhan perusahaan sawit di Indonesia. Maka penulis mengambil kesimpulan keberlanjutan ekspor CPO Indonesia dapat berhasil karena perandari seluruh aktor baik Negara maupun organisasi perusahaan kelapa sawit dan masyarakat yang saling bersinergi sehingga PDB dan devisa dari ekspor CPO dapat dipertahankan.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai peran aktor negara non-negara dalam keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II Uni Eropa, peneliti memberikan beberapa saran kepada calon peneliti untuk mengembangkan penelitian dengan topik serupa. Pertama, penelitian yang menganalisis potensi pasar negara lain yang memiliki ketertarikan terhadap produk CPO yang semakin luas dengan diterbitkannya sertifikasi ISPO. Kemudian untuk mengembangkan penelitian serupa, calon peneliti harus memperhatikan sumber data atau rujukan yang relevan. Penelitian ini menganalisis peran aktor negara dan non-negara dalam mempertahankan keberlanjutan ekspor CPO di pasar Internasional sehingga data diperoleh melalui data primer karena bukti dari kontribusi aktor banyak dibuktikan melalui aktivitas nyata. Sumber data primer yang dapat digunakan adalah dokumen resmi yang dapat diakses melalui website resmi, platform resmi perusahaan, *press release*, dan artikel-artikel relevan dalam situs terpercaya. Dalam mengembangkan penelitian juga perlu menguasai bahasa untuk mempermudah proses penelitian karena sumber data yang digunakan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, namun juga bahasa Inggris. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian “Diplomasi Multijalur Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II Uni Eropa” ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengembangkan topik-topik serupa.